

	News Title : Mengapa Indonesia Harus Punya Bursa Sawit?	
	Media Name : republika.id	Journalist : -
	Publish Date : 08 March 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Bursa CPO

Mengapa Indonesia Harus Punya Bursa Sawit?

08 Mar 2023, 13:00 WIB

Indonesia mengacu ke Malaysia dalam menentukan harga acuan minyak sawit.

JAKARTA -- Pendirian bursa komoditas sawit Indonesia terus diupayakan dan diharapkan bisa berdiri pada Juni 2023. Lewat adanya bursa tersebut, harga sawit internasional akan mengacu ke Indonesia. Harga minyak sawit Tanah Air untuk ekspor pun tak perlu lagi mengekor ke Malaysia.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, pihaknya masih optimisis lembaga bursa sawit bisa berdiri pada Juni mendatang. Setelah lembaga bursa sawit berdiri, perdagangan sawit akan dilakukan melalui bursa sehingga akan terjadi pertemuan tawar-menawar antarpelaku usaha.

"Kita harapkan nanti akan ada *money to money*, jadi harga akan terbentuk secara transparan atau *price discovery*. Kita harapkan ini terbentuk dua bulan setelah sawit masuk bursa," kata Didid dalam acara Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (7/3/2023).



Didid menambahkan, setelah *price discovery* bisa dicapai oleh bursa sawit, pada akhir tahun bursa akan menghasilkan *price reference* atau referensi acuan harga sawit yang dapat dipakai untuk perdagangan dalam negeri ataupun ekspor. Nantinya harga acuan tersebut juga dipakai dalam menentukan besa keluar hingga pungutan ekspor oleh pemerintah.

Sejauh ini, besa keluar dan pungutan ekspor mengacu kepada harga yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Adapun harga tersebut dibuat dan mengacu kepada harga bursa sawit Rotterdam 20 persen, Bursa Berjangka Jakarta (JFX) 20 persen, Bursa Komoditi dan Derivat Indonesia (OCDO) 60 persen.

"Kalau sudah ada *prices discovery*, akan kita bikin *price reference*, itu akan menjadi acuan untuk semuanya," kata Didid.

Didid mengatakan, saat ini pemerintah sudah memiliki dua lembaga bursa komoditas berjangka. Yakni, Bursa Berjangka Jakarta (JFX) serta Bursa Komoditi dan Derivat Indonesia (OCDO).

Menurut Didid, salah satu atau kedua bursa berjangka tersebut akan dimandatkan oleh pemerintah untuk menjadi bursa komoditas sawit. "Kami akan membuat satu kebijakan sedemikian rupa untuk mendorong agar sawit masuk bursa," kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku kerap ditegur oleh Presiden Joko Widodo karena harga minyak sawit Indonesia hingga saat ini masih mengacu ke Malaysia. Padahal, dibandingkan Malaysia, produksi sawit Indonesia jauh lebih besar.

"Saya ditegur terus oleh Pak Presiden, Pak Luhut (Menko Maritim dan Investasi), *kok kita andalkan Malaysia kita kan lebih banyak sawitnya*," kata Zulkifli.

Satu-satunya langkah untuk melepas ketergantungan Indonesia terhadap harga acuan sawit di Malaysia, yakni dengan membentuk bursa komoditas sawit. Bursa sawit akan menjadi tempat pusat perdagangan dan acuan harga dalam negeri ataupun ekspor.

Zulkifli lantas telah meminta Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai lembaga di bawah Kementerian Perdagangan untuk segera mempersiapkan bursa komoditas sawit. "Saya sudah bilang Juni atau paling lambat Juli harus sudah ada (bursa sawit), lembaganya sudah ada," ujarnya.



Adapun terkait pasokan *domestic market obligation* (DMO) untuk minyak goreng, Mendag mengungkapkan alokasi DMO tak mencapai target pemerintah sebanyak 450 ribu ton per bulan selama Februari. Pihaknya pun meminta agar para produsen dapat mengganti DMO yang belum direalisasikan pada Maret ini.

"Kemarin (Februari) baru percobaan tapi belum berjalan baik. Itu akan jadi utang untuk bulan ini (Maret) kita minta diselesaikan," kata Zulkifli.

Ia menjelaskan, penyebab volume DMO minyak goreng belum mencapai target karena ekspor yang juga melambat. Untuk mendapatkan hak kuota ekspor dari pemerintah, para pelaku industri sawit harus memasok minyak goreng DMO, baik dalam bentuk curah maupun kemasan sederhana.

Dengan kata lain, jika permintaan ekspor seret, akan berdampak langsung terhadap kegiatan memasok DMO oleh industri. Namun, Zulhas menegaskan, berapa pun ekspor yang dilakukan, pihaknya meminta agar seluruh produsen tetap memasok DMO hingga terpenuhi kuota 450 ribu ton per bulan.

"Sekarang kita tetapkan, berapa pun eksportnya itu kita tetapkan DMO 450 ribu ton," kata Zulkifli.

Kementerian Perdagangan juga telah memfokuskan penyaluran minyak goreng DMO di pasar tradisional. Yakni, minyak goreng curah dan kemasan sederhana. Minyaknya. Pasokan minyak goreng DMO disuplai pemerintah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan.

"Minyak itu terlihat sukar. Semua orang beli Minyaknya sehingga yang bisa beli premium jadi Minyaknya. Ini tidak adil, oleh karena itu Minyaknya di marketplace, supermarket ditarik, (hanya) masuk ke pasar rakyat," ujarnya.